



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 28 April 2017 No. 34

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : APRIYONO WEDI CHRESNANTO
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT - DAERAH OPERASI I JAKARTA
3. NIK : 90144
4. Alamat Kantor : Jl. TAMAN STASIUN CIKINI NO. 1, JAKARTA PUSAT
5. Tanggal Pelaporan : 25 Oktober 2012, 30 Desember 2015

Status Laporan

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 259 m2 & 275 m2, di Kota CIREBON, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010

	25 Oktober 2012	30 Desember 2015
Rp. 469.083.000	Rp. 469.083.000	Rp. 409.083.000
Rp. 469.083.000	Rp. 469.083.000	Rp. 469.083.000
B. HARTA BERGERAK		
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp. 480.000.000	Rp. 830.000.000
1. Mobil, merk ISUZU PANTHER TOURING, tahun pembuatan 2003, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2011	Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	0
C. SURAT BERTAGIH Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	14.775.151
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.14.775.151		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	3.191.675.151
III. HUTANG Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	3.191.675.151

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

